

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, wawancara, dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, diterima. Pajak kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memiliki peranan penting yang mendorong besarnya Pendapatan Asli Daerah, dapat disadari bahwa saat ini kendaraan memiliki kemajuan pesat. Pada zaman dahulu masyarakat memilih menggunakan transportasi tradisional namun kini beralih pada kendaraan bermotor yang dinilai lebih efektif dan modern. Fakta kemajuan itu sendiri terbukti dari jumlah kendaraan bermotor begitu banyak baik kendaraan umum ataupun pribadi, hal tersebut pasti menimbulkan peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), begitupun semakin banyaknya kendaraan yang beroperasi akan membutuhkan banyak juga bahan bakar yang memicu adanya pendapatan pajak dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Berdasarkan hal tersebut menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, diterima. Penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan setiap tahun pemilik kendaraan motor wajib membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Penerimaan PKB tersebut merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi PAD sehingga dapat disimpulkan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Jawa Barat maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, ditolak. Penerimaan BBNKB tersebut disebabkan masyarakat yang membeli motor baru secara kredit atau *Leasing* yang pasti proses balik nama atas nama pribadi atau BBNKB I tersebut membutuhkan waktu yang lama, begitupun masyarakat yang membeli motor bekas tidak akan melakukan balik nama atas nama pembelinya atau BBNKB II dan seterusnya. Sehingga hal ini sebagai pemicu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, diterima. Hal tersebut karena semakin banyaknya kendaraan bermotor beroperasi di wilayah Provinsi Jawa Barat akan semakin banyak juga kebutuhan bahan bakar yang digunakan serta mengingat pula pendapatan PBBKB paling besar itu dari sector Transportasi atau dari penggunaan bahan bakar oleh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat. sehingga perusahaan bahan bakar juga mengalami peningkatan pembelian untuk bahan bakar dan membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga besar. Kondisi tersebut yang menyebabkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, selanjutnya peneliti akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibayarkan oleh wajib pajak tepat waktu tanpa ada penundaan bayar sehingga terjadi piutang atau tunggakan pajak oleh wajib pajak, hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah kabupaten dan kota yang harus senantiasa mendorong dengan mengingatkan serta menghimbau *door to door* untuk ketertiban hal tersebut. Kemudian daripada hal itu banyak juga masyarakat pendatang atau biasa disebut perantau dari Provinsi lain yang mengoperasikan kendaraan bermotornya dengan plat nomor polisi dari daerah asal secara legal, seharusnya hal tersebut diperingatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota masing-masing kepada masyarakat pendatang tersebut agar mengganti plat nomor polisinya

2. sesuai wilayah domisilinya saat ini yaitu Provinsi Jawa Barat agar pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertib dan meningkat.
3. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kurang membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena tidak terlaksananya Balik Nama Semua kendaraan yang dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor, karena masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang nama pemiliknya masih nama orang lain (pembelian motor bekas) atau berkaitan dengan BBNKB II, III, dan seterusnya. Hal tersebut dibutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong hal tersebut sehingga dapat ditekan jumlah angka balik nama di masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.
4. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal itu disebabkan karena kebutuhan Bahan Bakar untuk mengoperasikan Kendaraan Bermotor oleh masyarakat (sektor transportasi), namun sektor industri dan pertambangan juga perlu dilakukan pengawasan agar tidak melegalkan bahan bakar bersubsidi ke kawasan industri dan pertambangan, hal tersebut membutuhkan peran aktif pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat sehingga dapat mendobrak angka pendapatan PBBKB yang maksimal dan tertib.